

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JAWA TIMUR I**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

FARAH HIDAYAT
NIM : 2013410021

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2016

Lahir : Sukajati, 17 Maret 1996
NIM : 2013410021
Program : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

Tempat, tanggal

NIM

Program Pendi

Jurusan

Program Studi

Judul

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Program Diploma

5 APRIL 2016

Dosen Pembimbing

Tanggal 25 APRIL 2016

Ketua Pro

Tanggal ..



Muhammad Farid, MM



Putri Wulanditya, S.E., M.Ak., CPSAK



Drs. Ec. Moch



I. Latar Belakang

Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap atau barang milik negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan penyajian laporan keuangan negara adalah menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui, hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah termasuk aset budaya atau sejarah, aset kemiliteran dan infrastruktur yang memerlukan perlakuan akuntansi yang spesifik. Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap misalnya pengamanan atas aset tetap yang kurang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan faktor kurangnya sumber daya manusia dalam menangani aset. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusunlah penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I”**.

II. Tujuan

Tujuan dari pengamatan ini adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Pengamatan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi pemerintahan atas aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

B. Kegunaan Pengamatan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data, keterangan-keterangan serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diangkat. Membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dilapangan.
- b. Agar dapat menambah informasi serta pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian sehingga dapat berguna bagi mereka yang memerlukan.
- c. Laporan ini dapat memberikan saran dan nilai-nilai yang bermanfaat dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam mematuhi peraturan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

III. Metode Pengamatan

Dalam mengumpulkan data yang akan diolah, mahasiswa menggunakan metode pengumpulan data. Metode tersebut adalah sebagai berikut

a. Wawancara

Metode yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait dan yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu pada Sub Bagian Umum yaitu Bagian Humas dan Rumah Tangga serta Bagian Keuangan.

b. Observasi

Mahasiswa melihat dan melakukan pengamatan langsung mengenai proses kegiatan. Dengan metode ini mahasiswa dapat memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang diteliti.

c. Dokumentasi

Adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan aset tetap. Buku, literatur, dan jurnal yang ada untuk mendapatkan landasan teori dan informasi pendukung dalam pembahasan masalah.

IV. Subjek Pengamatan

Tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai tindakan bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang dipenuhi oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kedudukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

V. Ringkasan Pembahasan

Berikut ini merupakan ringkasan pembahasn dari penelitian yang telah dilakukan :

A. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Standar Keuangan yang digunakan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I adalah Standar Akuntansi Pemerintah. Telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang basis akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I

adalah basis akrual (*accrual basis*). Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Aset tetap yang dimiliki oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur I terdiri atas;

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

B. Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Aset diperoleh melalui donasi dan bukan dari donasi (pembelian) secara tunai atau angsuran.

Tabel 1
Laporan Mutasi Barang Milik Negara
Tahun Anggaran 2014

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2014	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2014
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	5	7	9	11
131111	TANAH	147,728,980,084	0	0	147,728,980,084
132111	PERALATAN DAN MESIN	14,138,258,164	402,544,484	502,337,362	14,038,465,286
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	67,833,538,440	760,840,000	103,560,831	68,490,817,609
134111	JALAN DAN JEMBATAN	826,045,000	0	0	826,045,000
134112	IRIGASI	38,651,106	0	0	38,651,106
134113	JARINGAN	974,608,600	0	619,047,000	355,561,600
135121	ASET TETAP LAINNYA	0	403,730,430	65,945,000	337,785,430
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	233,028,039	326,083,358	30,979,000	528,132,397
TOTAL		231,773,109,433	1,893,198,272	1,321,869,193	232,344,438,512

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I

Keterangan:

Tabel tersebut menjelaskan tentang laporan mutasi barang mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014, saldo bertambah karena adanya pembelian dan saldo berkurang karena adanya pemusnahan, penghapusan yang disebabkan oleh kerusakan.

C. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas aset atau investasi tersebut. Pengukuran aset tetap diperoleh dengan harga beli ditambah pajak serta ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan sampai aset tetap tersebut dipakai pertama kali.

D. Pencatatan Aset Tetap

Pencatatan aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I menggunakan sistem aplikasi yaitu SIMAK BMN. Pencatatan pada SIMAK BMN dengan cara menginput dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan mutasi barang (SPK; kuitansi; faktur; SPM/SP2D; BAST; dokumen kepemilikan; surat keterangan penghapusan) setelah itu dilakukan proses dan menghasilkan *output* berupa data perolehan BMN; perubahan BMN; penyusutan BMN; dan penghapusan BMN. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Berikut merupakan tabel masa manfaat yang ada di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

E. Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I disajikan dalam laporan keuangan neraca dan tidak dibuat laporan keuangan laba rugi. Karena dalam pemerintahan membuat laporan keuangan hanya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

VI. Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I adalah basis akrual (*accrual basis*).
2. Pengakuan aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Aset diperoleh melalui donasi dan bukan dari donasi (pembelian) secara tunai atau angsuran.
3. Pengukuran aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas aset atau investasi tersebut. Pengukuran aset tetap diperoleh dengan harga beli ditambah pajak serta ditambah dengan biaya-biaya yang diperlukan sampai aset tetap tersebut dipakai pertama kali.
4. Pencatatan aset tetap Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I menggunakan sistem aplikasi yaitu SIMAK BMN. Pencatatan pada SIMAK BMN dengan cara menginput dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan mutasi barang (SPK; kuitansi; faktur; SPM/SP2D; BAST; dokumen kepemilikan; surat keterangan penghapusan) setelah itu dilakukan proses dan menghasilkan *output* berupa data perolehan BMN; perubahan BMN; penyusutan BMN; dan penghapusan BMN.
5. Penyajian aset tetap pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I disajikan dalam laporan keuangan neraca dan tidak dibuat laporan keuangan laba rugi. Karena dalam pemerintahan membuat laporan keuangan hanya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

B. Saran

Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I melakukan pencatatan menggunakan SIMAK BMN yang telah ditentukan oleh Kemenkeu, aplikasi SIMAK tidak memadai penjurnalan, sehingga jurnal dibuat secara manual. Aplikasi tidak sepenuhnya benar, jadi seharusnya juga ditambah dengan pencatatan secara manual.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, Bahtiar., Muchlis dan Iskandar. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, Dwi., Veronica, NPS Sylvia., Wardhani, Ratna., Farahmita, Aria dan Tanujaya, Edward. 2012. *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, 2010. Standar Akuntansi Pemerintah- Peraturan Pemerintah Nomor 71. Jakarta: Salemba Empat.